



RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020

RENJA 2020



Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id, www.bappenda.ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb) [bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb) [@bappenda.ntb](https://twitter.com/bappenda.ntb) www.bappenda.ntbprov.go.id bappenda@ntbprov.go.id

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
JL. MAJAPAHIT 17 MATARAM (83117)

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan kurunia serta perkenan-Nya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan penyusunan revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Revisi Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tahun ini merupakan peletakan dasar pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Renstra Bappenda Tahun 2018-2023, dimana pada Renja 2020 ini telah disesuaikan dengan kondisi yang akan kita hadapi pada tahun mendatang dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Diharapkan Renja Bappenda Provinsi NTB ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian Visi NTB Gemilang dan Misi NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB yang mengusung sasaran penguatan fiskal daerah dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Demikian Renja yang kami buat, semoga bermanfaat khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan tatakelola yang baik (*good governance*).

Mataram, Maret 2019

Kepala Bappenda Provinsi NTB




Ir. H. Iswandi, M.Si.

NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijkasanaan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV Penutup	43
Lampiran-Lampiran	



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mempertimbangkan arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dan merupakan bagian integral dalam implementasi rencana strategik yang tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan memiliki kesamaan perspektif terkait dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang diarahkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renstra Akhir 2019–2023 dengan mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam Rancangan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratif dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mitra terkaitnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah dalam pencapaian target-target makro pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulai mempertajam pemanfaatan teknologi informasi yang harus sejalan dengan pola layanan perbankan, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah. Bappenda Provinsi NTB sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta



Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dirubah menjadi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kerangka percepatan kinerja Bappenda, akan dicanangkan Tiga Prakarsa Bappenda yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur, (2) Penguatan akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3) Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur. Ketiga prakarsa Bappenda tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman spirit terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersamadan diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yang memuat : Integritas (*Integrity*), Harmonis (*Harmonically*), Sinergis (*Sinergic*), Amanah (*trusteeship*), serta Niat (*Aim*), yang disingkat menjadi IHSAN.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 menitik beratkan pada pencapaian keseimbangan secara proporsional antara Upaya mensukseskan target indikator pembangunan daerah yang termuat dalam (1) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 dan RKPD 2020, (2) Ketersediaan potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi serta (3) Upaya pengelolaan potensi pendapatan daerah (*earning effort*), dimana ketiganya merupakan *triple-helix management* pendapatan daerah sehinggadiharapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;



12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah untuk menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2020, sedangkan tujuannya adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran pelaksanaan tugas fungsi Bappenda;
2. Merumuskan rencana program dan prioritas pelaksanaan tugas fungsi Bappenda;
3. Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal;
4. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya;
6. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima; dan
7. Memantapkan kinerja organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.2 Landasan Hukum

Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Bappenda Provinsi NTB

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappenda Provinsi NTB serta susunan garis besar dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Provinsi NTB tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019)
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun-tahun sebelumnya
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Provinsi NTB tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda Provinsi NTB dan /atau realisasi APBD.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Bappenda Provinsi NTB berdasarkan indikator yang sudah ditentukan



- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
 - Menjelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
 - Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
 - Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional (Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Bappenda Provinsi NTB)
 - Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB .
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappenda Provinsi NTB.
- 3.3. Program dan Kegiatan
 - Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Pelaksanaan Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB pada tahun 2018, merupakan tahun transisi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru dan kebijakan perencanaan masih didasarkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dan secara garis besar program dan kegiatan yang ada telah mencapai sasaran yang diharapkan dalam Renstra periode 2013-2018, namun ada beberapa Program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi dan beberapa program dan kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Untuk mencapai hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah, Bappenda Provinsi NTB sesuai dengan urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappenda Provinsi NTB untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran Unit Pelayanan Pajak Daerah se NTB dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan serta memperluas jenis layanan yang berbasis Teknologi Informasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Bappenda Provinsi NTB. Pencapaian terhadap target Renstra serta rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 secara keseluruhan. Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
BAPPENDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018	
			5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN URUSAN FUNGSI PENUNJANG																							
	BIDANG KEUANGAN (PENDAPATAN)																							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	61.379	69,31	42.544	26,63	16343	3,79	2325	4,76	2.919	6,05	3.716	41,08	6.714	25,54	15.675	95,91	96	94,85	58.218	94,85	95
	Penyediaan jasa surat menyurat	Masa pembiayaan jasa surat menyurat	60	452	41,72	314	15,16	114	1,95	15	2,89	22	4,49	34	4,78	36	14,11	106	93,04	93	55,83	421	93,05	93
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu	60	11.427	37,66	7.171	14,55	2770	2,53	482	2,67	508	3,71	707	4,27	814	13,19	2.512	90,67	91	84,74	9.683	141,23	85
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	100	2.869	74,82	2.146	22,19	637	4,46	128	3,74	107	5,94	171	7,86	226	22,01	631	99,18	99	96,83	2.778	96,83	97
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga Kebersihan Kantor	100	9.301	74,96	6.972	27,37	2546	4,04	375	4,35	405	7,93	738	10,99	1.022	27,31	2.540	99,79	100	102,27	9.512	102,27	102
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis (ATK) kantor	100	3.282	74,72	2.452	25,97	852	4,73	155	4,75	156	7,02	230	8,36	274	24,86	816	95,72	96	99,58	3.268	99,58	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	100	6.930	60,78	4.212	16,70	1158	1,14	79	3,56	247	1,66	115	8,78	609	15,14	1.049	90,66	91	75,93	5.262	75,93	76
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	419	44,71	312	14,75	103	1,90	13	2,90	20	3,75	26	5,89	41	14,43	101	97,80	98	98,57	413	164,29	99
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	100	15.841	70,23	11.125	32,00	5070	4,46	706	5,73	908	5,52	875	14,98	2.372	30,69	4.861	95,88	96	100,92	15.986	100,92	101
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	324	67,07	217	28,01	91	2,64	9	3,84	12	5,15	17	14,26	46	25,90	84	92,46	92	92,97	301	92,97	93



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		
1	3	4																							
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	60	1.600	37,17	991	21,95	586	2,04	54	3,07	82	5,37	143	11,25	300	21,73	580	98,99	99	98,17	1.571	163,61	98	
	Penyelarasan program Pemerintah Pusat Daerah	Jumlah unit jasa kebutuhan koordinasi antar lembaga	60	2.213	46,48	1.714	16,25	599	1,72	63	4,04	149	2,15	79	7,88	291	15,79	582	97,15	97	103,78	2.297	172,97	104	
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis Perkantoran	60	1.826	42,42	1.291	14,98	456	2,13	65	2,13	65	6,40	195	4,27	130	14,93	454	99,69	100	95,58	1.745	159,30	96	
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor	100	4.896	74,02	3.624	27,82	1362	3,67	179	4,87	238	7,90	387	11,30	553	27,73	1.358	99,68	100	101,75	4.982	101,75	102	
									2,88		3,73		5,15		8,84	Rata-rata capaian kinerja		96,21	96					120,36	96
																Predikat kinerja		ST	ST						
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	100	48.278	71,29	34.417	25,37	12249	0,66	318	1,58	761	32,46	3.977	54,53	6.679	22,64	11.734	89,23	96	93,93	46.151	93,93	96	
	Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya kemudahan wajib pajak dalam mengakses pelayanan	100	22.003	72,58	15.970	18,86	4151	-	0	1,29	283	4,89	1.076	12,26	2.699	18,44	4.058	97,76	98	91,02	20.028	91,02	91	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan jumlah kendaraan oprasional organisasi	100	7.635	63,33	4.836	33,77	2579	-	0	-	-	20,69	1.579	12,20	931	32,88	2.511	97,37	97	96,22	7.346	96,22	96	
	Pengadaan meubelair	Terwujudnya Pengadaan Meubelair	100	3.773	76,55	2.888	22,07	832	0,54	20	2,28	86	2,01	76	15,48	584	20,30	766	92,00	92	96,85	3.654	96,85	97	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya kenyamanan gedung kantor	60	3.281	49,88	2.728	8,79	480	0,68	37	0,78	42	2,17	119	4,78	261	8,41	460	95,75	96	58,29	3.188	97,15	97	



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %		
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional pada kantor Bappenda NTB dan 9 UPTB-UPPD/ SAMSAT se-NTB	100	6.198	64,61	4.005	25,00	1550	3,16	196	3,51	218	7,16	444	7,80	484	21,64	1.341	86,54	87	86,25	5.346	86,25	86	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	60	1.043	40,46	703	14,04	244	1,54	27	2,25	39	4,21	73	5,14	89	13,15	229	93,67	94	53,62	932	89,36	89	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Meningkatnya kinerja sesuai standar dan tepat waktu	60	1.349	44,99	1.011	12,81	288	1,66	37	1,80	40	2,91	65	5,97	134	12,34	277	96,29	96	57,33	1.289	95,54	96	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor	60	2.996	45,59	2.276	42,55	2125	-	0	1,05	52	10,89	544	29,97	1.496	41,91	2.093	98,49	98	87,50	4.369	145,84	146	
									0,95		1,62		6,87		11,70				Rata-rata capaian kinerja	94,73	95,00			99,78	100
																			Predikat kinerja	ST	ST				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mendukung peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	1.429	53,15	760	27,38	391	3,16	45	7,57	108	12,81	50	30,01	117	53,55	321	195,54	82	106,70	1.081	106,70	76	
	Pendidikan dan pelatihan formal	bertambahnya jumlah dan kapasitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan teknis	100	764	51,55	394	26,03	199	2,78	21	9,36	71	0,67	5	6,39	49	19,21	147	73,80	74	70,76	540	70,76	71	
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terwujudnya mental dan fisik aparatur yang baik untuk dapat menjalankan tugas secara optimal	60	666	32,99	366	17,36	193	2,16	24	3,31	37	4,05	45	6,18	69	15,71	174	90,48	90	48,70	541	81,17	81	
									2,47		6,34		2,36		6,29				Rata-rata capaian kinerja	82,14	82			75,96	76
																			Predikat kinerja	T	T				



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Dok)	20	2.407	16,00	1.413	4,00	1011	0,41	103	0,72	181	15,65	158	50,61	512	67,39	954	1.684,72	94	83,39	2.367	416,94	98
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terdatanya tingkat capaian kinerja program dan kegiatan	5	703	4,00	417	1,00	304	0,11	34	0,32	97	0,14	42	0,39	119	0,96	292	96,16	96	4,96	709	99,23	101
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terdatanya persentase tingkat capaian kinerja keuangan	5	543	4,00	372	1,00	192	0,32	61	0,24	46	0,03	6	0,38	73	0,97	186	96,82	97	4,97	558	99,36	103
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja dan RKA/DPA.	10	1.161	8,00	624	2,00	515	0,03	8	0,15	38	0,43	110	1,24	320	1,85	476	92,41	92	9,85	1.100	98,48	95
									0,15		0,24				0,67	Rata-rata capaian kinerja		95,13	95				99,03	99
																Predikat kinerja		ST	ST					
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Tertib pengelolaan aset BMN/BMD	100	1220	66,92	816	25,02	305	3,51	43	5,93	72	6,30	77	8,42	103	24,17	295	96,59	97	91,08	1.111	91,08	91,08
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pengelolaan manajemen aset/barang daerah	100	1220	66,92	816	25,02	305	3,51	43	5,93	72	6,30	77	8,42	103	24,17	295	96,59	97	91,08	1.111	91,08	91,08
									3,51		5,93		6,30		8,42	Rata-rata capaian kinerja		96,59	97				91,08	91,08
																Predikat kinerja		ST	ST					



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pertumbuhan PAD (%)	7,64	54.557	5,19	32.267	7,64	19.329	1,72	1734	1,42	2.759	1,53	4.030	3,36	8.498	8,04	17.021	1,05	88	13,23	49.288	1,73	90
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	100	1.801	52,95	953	35,83	645	0,88	16	9,13	164	5,82	105	10,98	198	26,80	483	74,80	75	79,75	1.436	79,75	80
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya realisasi penerimaan pajak daerah	100	21.500	62,98	13.540	30,49	6.555	2,80	602	5,46	1.174	6,67	1.433	11,97	2.574	26,90	5.783	88,22	88	89,88	19.323	89,88	90
	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	Terfasilitasinya peningkatan keterampilan teknis ke Samsatan	100	4.357	71,74	3.126	24,77	1.079	1,44	63	6,23	271	7,93	346	8,61	375	24,21	1.055	97,75	98	95,95	4.181	95,95	96
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	100	9.186	69,33	6.368	29,03	2.667	5,48	504	4,49	413	9,27	851	9,00	826	28,23	2.594	97,25	97	97,56	8.962	97,56	98
	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya peningkatan sadar pajak dan retribusi daerah	100	3.210	37,85	1.215	47,31	1.518	6,00	193	3,70	119	3,82	122	30,45	977	43,97	1.411	92,94	93	81,82	2.626	81,82	82
	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa Pajak Daerah dan Retribusi daerah	100	542	33,09	179	69,76	378	4,44	24	2,87	16	1,34	7	39,43	214	48,08	260	68,93	69	81,17	440	81,17	81
	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya penyediaan informasi pengelolaan pendapatan daerah	100	1.077	44,38	478	58,29	628	2,57	28	2,77	30	12,06	130	34,20	368	51,61	556	88,53	89	95,99	1.034	95,99	96



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Terfasilitasinya kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	100	1.766	56,39	996	55,02	972	1,94	34	3,57	63	4,42	78	41,74	737	51,68	913	93,92	94	108,07	1.909	108,07	108
	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Terfasilitasinya update data wajib pajak terlaksananya penyampaian surat teguran dan penangihan tunggakan kepada wajib pajak	100	2.461	20,38	501	51,07	1.257	3,74	92	9,99	246	15,98	393	20,89	514	50,59	1.245	99,06	99	70,97	1.746	70,97	71
	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Terfasilitasinya kebutuhan konsultasi koordinasi dan monitoring dana perimbangan	60	2.165	42,07	1.518	21,02	758	0,86	31	1,25	45	0,99	36	12,21	441	15,32	553	72,91	73	57,39	2.071	95,65	96
	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya penyusunan bahan laporan rapat koordinasi dipenda NTB dengan dinas instansi terkait	100	1.187	68,02	808	20,33	241	-	0	3,24	39	2,21	26	13,21	157	18,67	222	91,84	92	86,69	1.029	86,69	87
	Koordinasi dan Sinkoinisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Terfasilitasinya penyusunan data hasil sinkronisasi penerimaan retribusi dan PLL	100	567	41,57	236	32,90	186	8,17	46	5,72	32	5,61	32	5,00	28	24,50	139	74,45	74	66,07	374	66,07	66
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Terfasilitasinya penyusunan data hasil verivikasi administrasi pemungutan retribusi dan PLL	100	546	45,04	246	43,12	235	1,05	6	1,82	10	21,83	119	8,57	47	33,27	182	77,15	77	78,31	428	78,31	78
	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Terfasilitasinya penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan bimtek	100	2.497	43,22	1.079	66,97	1.672	2,30	57	2,90	72	11,64	291	28,21	704	45,05	1.125	67,26	67	88,26	2.204	88,26	88



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)		Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengawasan tunggakan penerimaan retribusi dan PLL	100	322	60,16	194	62,80	202	7,71	25	4,07	13	16,81	54	33,03	106	61,63	198	98,14	98	121,80	392	121,80	122
	Aplikasi Retribusi dan PPL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Aplikasi Retribusi dan PPL	100	402	85,60	344	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,60	344	85,60	86
	Sosialisasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi Pajak Daerah sesuai peraturan yang berlaku	100	615	78,88	485	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,88	485	78,88	79
	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya penyusunan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	100	255	-	-	81,41	208	5,70	15	8,51	22	-	-	58,21	148	72,42	184,64	88,96	89	72,42	185	72,42	72
	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Terfasilitasinya upaya peningkatan penerimaan Pajak Air Permukaan	60	101	-	-	74,24	126	-	0	17,57	30	3,84	7	48,58	82	70,00	118,35	94,28	94	70,00	118	116,66	117
									3,67		6,22		8,68		27,62	Rata-rata capaian kinerja		77,18	77				89,03	89
																	Predikat kinerja		T	T				
7	Program Reformasi Birokrasi	Kinerja Pelayanan Aparatur	100	1.276	77,37	987	20,38	260	4,13	53	4,75	61	4,28	55	5,98	76	19,13	244	93,86	94	96,51	1.231	96,51	97
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aparatur yang Optimal	60	1.276	46,42	987	12,23	260	2,48	53	2,85	61	2,57	55	3,59	76	11,48	244	93,86	94	57,90	1.231	96,51	97
									2,48		2,85		2,57		3,59	Rata-rata capaian kinerja		93,86	94				96,51	97
																	Predikat kinerja		ST	ST				



No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Perubahan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (2018) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang di evaluasi (2018)	Tingkat Cpaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) 2018		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %	
8	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kinerja aparatur	100	400	65,08	260	34,39	137	-	0	-	-	15,12	60	17,97	72	33,09	132	96,21	96	98,16	392	98,16	98
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan aset	100	400	65,08	260	34,39	137	-	0	-	-	15,12	60	17,97	72	33,09	132	96,21	96	98,16	392	98,16	98
									-	-			15,12		17,97	Rata-rata capaian kinerja		96,21	96			98,16	98	
																			Predikat kinerja		ST	ST		
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		91,51	92		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST	ST		
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja : 1. Komitmen Bappenda, 2. memiliki program kerja, 3. Tersedianya Personil, 4. Tersedianya Dana, 5. Adanya UU 23 Tahun 2014, UU 34 Tahun 2001, dan kemauan Politik Pemda Untuk Peningkatan PAD,																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Masih adanya pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan, 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: terus mengintensifkan pemungutan PKB dan BBNKB dengan mengoptimalkan Samsat Bantuan, dan penambahan jam layana																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya: Menunggu terbitnya RPJMD periode 2018-2023 sebagai peletakan dasar perencanaan baru gubernur terpilih																								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai yang rata-rata mencapai 91,51%. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar



dapat dilaksanakan dan kebijakan yang ditetapkan sudah tepat. Adapun predikat yang diberikan oleh instansi penilai dalam hal ini Inspektorat Provinsi NTB terhadap kinerja Bappenda Tahun 2018 bernilai A (81,68) tergolong *Excellent*.

Hal inilah yang memberikan optimisme bagi segenap jajaran Bappenda Provinsi NTB untuk menjalankan rutinitas program dan kegiatan untuk selalu berpedoman pada tata cara dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, guna terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan bersih (*Clean Governance*). Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terealisasi.

Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pencapaiannya mengalami kontraksi sebesar -1,43%, hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian-penyesuaian akibat adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah:

Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi dan misi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dapat terealisasi. Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pencapaiannya mengalami kontraksi sebesar -1,43%, ada beberapa hal yang perlu diinformasikan, diantaranya adalah:

- a. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “prinsip-prinsip *customer relationship*” yang makin nyaman;
- b. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi dari sektor non pajak seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak, dan kerjasama pengelolaan bersama asset di lingkungan Bappenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat pengguna. Adapun peningkatan pelayanan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Peningkatan standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pada UPTB-UPPD Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di kota/kabupaten;
2. Peningkatan fasilitas pelayanan khusus melalui pelayanan drive thru, pelayanan samsat pasar (*outlet*), samsat keliling, Samsat Kartono, Samsat Ladies, dan Samsat Delivery yang berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna;
3. Pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi;



4. Perintisan *banking system* dalam penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak;
5. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e-Samsat); dan
6. Mendorong kesadaran taat bayar pajak khususnya ASN Bappenda pada tahap awal, dan selanjutnya OPD Pemprov NTB, serta masyarakat yang berdomosili di wilayah Nusa Tenggara Barat melalui fasilitas Auto Debet tebungan Bank NTB (t – Samsat).

Pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian Renstra, kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Proyeksi 2019
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pertumbuhan PAD			%	13,78	13,64	2,09	5,19	4,94	38,94	16,79	(0,93)	23,87	-1,43	-4,13
2	Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Sentra	30	35	38	43	53	30	35	38	43	63	70
3	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor			Kali	720	770	802	1.128	1.025	712	757	802	1.122	1.017	1.396
4	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah			%	41,63	42,51	54,25	44,56	45,42	40,77	42,44	47,55	45,54	47,06	46,84
5	Jumlah Penerimaan PAD			Milyar Rp.	1.194,26	1.420,47	1.450,04	1.641,69	1.767,75	1.115,06	1.372,66	1.359,84	1.654,96	1.660,30	1.682,13

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Proyeksi 2019
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya			%	65,50	62,37	58,21	62,50	63,50	59,15	57,23	40,91	50,16	53,04	62,37
7	Data potensi Wajib Pajak yang Divalidasi			WP	1.200.000	1.364.167	1.473.721	1.472.548	1.523.000	1.171.000	1.309.972	1.369.817	1.408.732	1.513.044 104.312	1.686.707
8	Jumlah Penerimaan Retribusi			Milyar Rp.	13,86	22,90	29,891	24,69	59,49	19,84	24,36	29,79	23,21	21,30	23,80
9	Dokumen Rekonsiliasi Data Pajak dan Dana Perimbangan Dengan Instansi Terkait			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan			OPD	45	45	45	45	45	30	28	27	23	18	45
11	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan			Milyar Rp.	1.226,21	1.491,85	2.333,60	3.342,73	3.317,99	1.212,09	1.450,70	2.583,03	3.268,93	3.212,39	3.475,32
12	Dokumen Rencana Perubahan Target dan Penetapan Target Pendapatan Daerah Tahun Berikutnya			Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Pada tahun berjalan program yang dilaksanakan sejumlah 6 Program dan 54 kegiatan, dengan perkiraan capaian kinerja sebesar 94,60%, dengan rincian sebagai berikut: (1).Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah perkiraan rasio capaiannya 92,00%; (2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio 97,50%; (3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,50%; (4). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur deng rasio capaiannya 90,00%; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, perkiraan rasio 92,50% dan yang terakhir adalah (6) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rasio capaian 85,00%.

Berikut diuraikan tentang Realisasi Capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2018

Indikator Kinerja Utama Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pd Tahun ke-				
	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Pertumbuhan PAD	13,78	13,64	2,09	5,19	7,64	29,6	24,86	-0,93	23,87	-1,43	114,84	82,29	93,78	102,61	-118,72

Sumber : Bappenda Provinsi NTB (data diolah)

Sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, target renstra menunjukkan angka penurunan yang signifikan terutama dari tahun 2015 - 2016 sebesar -11,55%, sementara target dari tahun 2014 - 2015 turun sebesar -0,14%, sedangkan target tahun 2016 - 2017 meningkat sebesar 3,1%. Penurunan target pada tahun 2016 tersebut disebabkan karena tidak tercapainya realisasi pertumbuhan PAD sehingga menyebabkan direvisinya RPJMD 2013-2018 terkait dengan penetapan indikator kinerja daerah yang dirubah pada akhir tahun 2016 sementara realisasi capaian tahun 2017 sebesar 23,87%.

Pada tahun 2018 realisasi capaian mengalami penurunan sebesar -1,43%, hal ini disebabkan karena adanya transisi kebijakan politik dari Gubernur lama dari masa periode pertengahan 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2018 dengan gubernur baru dari masa periode pertengahan 2018 sampai dengan tahun 2023.

Persentase rasio capaian pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan pada tahun 2015 akan tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan pada tahun 2017 rasio capaian pada tahun 2017 sebesar 102,61%. Dan sampai dengan akhir periode Renstra di tahun 2018, pertumbuhan PAD berkontraksi sebesar 1,43 dengan rasio capaian -118,72%. Hal ini tentu menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Bappenda Provinsi NTB selaku otorita pengelola pendapatan, yang dipicu oleh beberapa penyebab antara lain: (1) Tahun 2018 ini merupakan masa transisi pemerintahan dan adanya pengalihan guru-guru SMU menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi yang menyebabkan timbulnya belanja, namun tidak diikuti dengan penambahan penerimaan; (2) PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai salah satu sumber penerimaan telah dibubarkan sehingga tidak ada pemasukan, dan pada perubahan target pendapatan nilai nominalnya dihilangkan; (3) Pada komponen Retribusi Jasa Usaha, khususnya pada pemakaian kekayaan daerah yang ditargetkan meningkat namun pada kenyataannya hanya mampu direalisasikan kurang dari 25 persen; dan (4) Keberadaan hibah daerah sebagai recovery pasca bencana gempa bumi yang melanda P. Lombok pada Agustus dan September 2018, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat/daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, yang berada pada Lain-lain Pendapatan Daerah belum bisa digunakan dan dicairkan, sehingga progress anggaran juga tidak seperti target yang ditetapkan.

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Pendapatan dengan Target Pendapatan
Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 (dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Dan Jenis Pendapatan	2014			2015			2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Total Pendapatan	2.923.616	2.789.427	95,41	3.555.509	3.448.114	96,98	3.802.933	3.853.806	101,34	5.121.402	5.083.156	99,25	5.346.185	4.931.139	92,42
I	Pendapatan Asli Daerah	1.194.262	1.115.060	93,37	1.420.471	1.372.109	96,60	1.450.045	1.356.928	93,58	1.641.689	1.684.469	102,61	1.767.746	1.660.300	93,92
a.	Pajak Daerah	963.903	904.784	93,87	1.008.440	1.010.655	100,22	1.037.550	1.003.261	96,70	1.144.453	1.180.802	103,18	1.293.238	1.269.689	98,18

No.	Kelompok Dan Jenis Pendapatan	2014			2015			2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pajak Kendaraan Bermotor	214.350	218.001	101,70	230.838	240.153	104,04	248.153	269.188	108,48	311.894	324.423	104,02	362.500	389.092	107,34
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	336.836	339.627	100,83	335.050	318.503	95,06	318.503	322.209	101,16	299.818	313.247	104,48	350.936	357.905	101,99
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	212.278	209.841	98,85	214.278	227.320	106,09	192.900	188.946	97,95	192.900	198.672	102,99	225.593	230.105	102,00
	Pajak Air Permukaan	350	271	77,43	275	298	108,36	300	361	120,33	1.000	1.003	100,30	1.100	931	84,63
	Pajak Rokok	200.090	137.043	68,49	228.000	224.381	98,41	277.693	222.557	80,14	338.842	343.457	101,36	353.110	291.655	82,60
b.	Retribusi Daerah	13.856	19.839	143,18	22.902	24.357	106,35	29.891	29.516	98,75	24.685	23.086	93,52	59.487	21.300	35,40
	Retribusi Jasa Umum	4.469	10.851	242,81	13.446	14.153	105,26	19.059	19.214	100,81	7.519	9.938	132,17	9.269	8.621	92,99
	Retribusi Jasa Usaha	8.650	7.886	91,17	8.563	8.410	98,21	9.183	8.541	93,01	15.322	11.284	73,65	48.175	10.850	22,03
	Retribusi Perijinan Tertentu	738	1.101	149,19	894	1.794	200,67	1.649	1.761	106,79	1.844	1.864	101,08	2.042	1.825	89,39
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	93.287	55.670	59,68	123.838	63.229	51,06	157.965	72.828	46,10	166.202	163.852	98,59	62.302	60.080	96,43
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	123.215	134.768	109,38	265.291	273.867	103,23	224.640	251.324	111,88	306.347	316.728	0,10	352.719	309.230	88,06
II	Dana Perimbangan	1.226.208	1.212.086	98,85	1.491.850	1.450.695	97,24	2.333.604	2.489.758	106,69	3.342.730	3.268.927	97,79	3.317.993	3.202.016	96,50
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	191.155	177.033	92,61	188.959	147.804	78,22	247.954	374.903	151,20	367.529	346.522	94,28	325.953	261.643	80,27
b.	Dana Alokasi Umum	980.390	980.390	100,00	1.088.634	1.088.634	100,00	955.793	1.024.551	107,19	1.537.778	1.537.778	100,00	1.537.778	1.537.778	100,00
c.	Dana Alokasi Khusus	54.663	54.663	100,00	214.257	214.257	100,00	1.129.857	1.090.304	96,50	1.437.423	1.384.627	96,33	1.454.262	1.412.967	97,16
III	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	503.146	462.280	91,88	643.188	625.310	97,22	19.285	7.120	36,92	136.983	129.760	94,73	260.446	68.442	26,28

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014 target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp. 2.92 triliun sementara raealisasi penerimaan berjumlah Rp. 2,78 triliun atau 95,41%, pada tahun 2015 target Pendapatan Daerah sejumlah Rp.3,55 triliun sementara target pada tahun 2015 sebesar Rp.3,45 triliun atau 96,98% secara keseluruhan sementara pada tahun 2016 target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp.3,80 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp.3,85 triliun atau 101,34%. Sementara tahun 2017 target pendapatan daerah Provinsi NTB sebesar Rp.5,12 triliun sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp.5,08 triliun atau 99,25% secara keseluruhan. Pada tahun 2018 target pendapatan daerah Provinsi NTB sebesar Rp.5,34 triliun

sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp.4,93 triliun atau 92,42% secara keseluruhan hal ini berarti bahwa target pendapatan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2018 realisasinya tidak mencapai 100%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait dengan pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, koordinasi dan sinergi program antar OPD penghasil di Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan menjadi hal yang perlu dikaji sehingga permasalahan dan hambatan yang dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, maka dapat pula diketahui tantangan dan peluang yang dapat dijadikan suatu tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

Apabila kita komparasikan dengan OPD Kabupaten/Kota, ada perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota. Perbedaannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing OPD penghasil, sehingga sasaran dari kegiatan yang hendak dicapai berbeda. Selain itu kewenangan dalam memungut pajak pun berbeda, sehingga objek pajaknya pun menjadi berbeda.

Persamaan yang dimiliki oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dapat dilihat dari indikator kinerja dan sasaran yang hendak dicapai. Persamaan tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas pegawai;
4. Menciptakan *networking* dan koordinasi yang sinergi.

Untuk pemasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat;
2. Ketiadaan *prototype* standar sarana prasarana kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan;



3. Kuantitas dan kualifikasi SDM *legal drafter* belum memadai;
4. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan;
5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bappenda;
6. Model *Smart Planning* belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LKjIP;
7. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan;
9. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya;
10. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminitrasi/ KKN.

Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan yang makin bersaing dengan kelembagaan keuangan baik sektor pemerintahan lainnya maupun dengan sektor swasta;
2. Melanjutkan standarisasi penyediaan sarana penunjang pelayanan yang makin proporsional dengan beban layanannya;
3. Mempertajam kalkulasi dan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah;
4. Melanjutkan upaya-upaya penguatan peran dan fungsi selaku unit pengelola dan koordinator pendapatan daerah yang makin akuntabel;
5. Terus mengupayakan otomatisasi pelayanan pendapatan yang makin memiliki keterkaitan dengan sistem perbankan yang menjadi mitra kas daerah;
6. Terus mengupayakan mempertajam kalkulasi untuk memperkuat kualitas penetapan kebutuhan belanja;
7. Terus berupaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berdasarkan kondisi, fenomena, isu strategis yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Menetapkan program prioritas pembangunan (Common Goals) dan kegiatan tematik untuk mensinergikan pembangunan yang bermutu dan akuntabel.

Apabila kita bandingkan dengan rancangan awal RKPD tahun 2020, maka program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda prioritas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan misi ketiga yaitu melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan serta misi kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. Untuk dapat mendukung pencapaian visi Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut, maka diperlukan sinkronisasi agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan agenda prioritas yang direncanakan oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hal-hal yang digariskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2020, penyusunan program/pembangunan diarahkan kepada program pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan sasaran programnya yaitu terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi.

Selain itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan perbankan dan pihak lainnya yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan serta penguatan pelayanan Bappenda, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020.

Tabel 2.6

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	se-NTB	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	16.712.422.493	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	se-NTB	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	16.712.422.493
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi NTB	Jumlah SURAT	9.500 Surat	135.130.299	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi NTB	Jumlah SURAT	9.500 Surat	135.130.299
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	JENIS Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jenis	3.143.022.759	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	JENIS Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jenis	3.143.022.759
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi NTB	Jumlah tenaga administrasi keuangan	83 Orang	1.094.419.554	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi NTB	Jumlah tenaga administrasi keuangan	83 Orang	1.094.419.554
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi NTB	Jumlah tenaga kebersihan kantor	115 Orang	2.626.852.799	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi NTB	Jumlah tenaga kebersihan kantor	115 Orang	2.626.852.799
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi NTB	Jenis alat tulis kantor	620 Jenis	1.183.665.731	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi NTB	Jenis alat tulis kantor	620 Jenis	1.183.665.731
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	Jenis barang cetakan dan penggandaan	145 Jenis/ Pkt	1.943.129.028	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	Jenis barang cetakan dan penggandaan	145 Jenis/ Pkt	1.943.129.028
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	Jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	148.895.829	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	Jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	148.895.829
1.8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	267 Unit/ Pkt	2.702.427.723	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	267 Unit/ Pkt	2.702.427.723
1.9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi NTB	Jenis bahan bacaan	147 Media/ Exp	107.589.675	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi NTB	Jenis bahan bacaan	147 Media/ Exp	107.589.675
1.10	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi NTB	Jumlah Orang yang dijamu makanan dan minuman	144 kali	554.640.748	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi NTB	Jumlah Orang yang dijamu makanan dan	144 kali	554.640.748

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
1.11	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah Orang penyelaras program pusat dan daerah	63 kali	600.356.178	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Provinsi NTB	minuman Jumlah Orang penyelaras program pusat dan daerah	63 kali	600.356.178
1.12	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Provinsi NTB	Jumlah tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	17 Orang	870.010.605	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Provinsi NTB	Jumlah tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	17 Orang	870.010.605
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah tenaga pengamanan kantor	54 Orang	1.602.281.566	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Provinsi NTB	Jumlah tenaga pengamanan kantor	54 Orang	1.602.281.566
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi NTB	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100 %	13.540.967.857	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi NTB	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100 %	13.540.967.857
2.1	Pembangunan gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah gedung kantor yang dibangun	23 Unit	3.825.281.007	Pembangunan gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah gedung kantor yang dibangun	23 Unit	3.825.281.007
2.2	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Provinsi NTB	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	43 Unit	1.578.216.606	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Provinsi NTB	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	43 Unit	1.578.216.606
2.3	Pengadaan mebeleur	Provinsi NTB	Jumlah paket mebeleur	53 Buah/ Pkt	978.506.105	Pengadaan mebeleur	Provinsi NTB	Jumlah paket mebeleur	53 Buah/ Pkt	978.506.105
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	12 Paket	933.282.187	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	12 Paket	933.282.187
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/opresional	170 Unit	2.140.246.900	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ opresional	170 Unit	2.140.246.900
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 Unit	330.499.060	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah perlengkapan gedung kantor	12 Unit	330.499.060
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Provinsi NTB	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 Unit	358.600.080	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Provinsi NTB	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	12 Unit	358.600.080
2.8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung	12 Paket	3.396.335.912	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Provinsi NTB	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung	12 Paket	3.396.335.912



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
			kantor					kantor		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	944.462.372	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi NTB	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	100 %	944.462.372
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi NTB	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	45 Orang	284.938.143	Pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi NTB	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	45 Orang	284.938.143
3.2	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Provinsi NTB	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	48 Kali	237.169.871	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Provinsi NTB	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	48 Kali	237.169.871
3.3	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Provinsi NTB	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	11 Unit	243.469.283	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Provinsi NTB	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	11 Unit	243.469.283
3.4	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Provinsi NTB	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan	2 Paket	178.885.075	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Provinsi NTB	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan	2 Paket	178.885.075
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi NTB	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	93 Dokumen	1.093.303.036	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi NTB	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	93 Dokumen	1.093.303.036
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan, Laporan Evaluasi Kinerja) yang disusun	44 Dokumen	255.405.359	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi NTB	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan, Laporan Evaluasi Kinerja) yang disusun	44 Dokumen	255.405.359



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
4.2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	238.013.209	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Mataram	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	238.013.209
4.3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Mataram	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja OPD; RKA, DPA; DPPA; Ranhir Renstra OPD, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja dan Pakta Integritas Individu/IKI. yang disusun	47 Dokumen	431.459.399	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Mataram	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja OPD; RKA, DPA; DPPA; Ranhir Renstra OPD, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja dan Pakta Integritas Individu/IKI. yang disusun	47 Dokumen	431.459.399
4.4	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Mataram	Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kerjanya	1 Dokumen	168.425.069	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Mataram	Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kerjanya	1 Dokumen	168.425.069
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 %	772.513.065	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 %	772.513.065
5.1	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Provinsi NTB	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	11 Dokumen	503.582.838	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Provinsi NTB	Jumlah laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah	11 Dokumen	503.582.838
5.2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Provinsi NTB	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	174.509.166	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Provinsi NTB	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	174.509.166
5.3	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Mataram	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	4 Dokumen	94.421.061	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Mataram	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	4 Dokumen	94.421.061
6.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 %	30.818.977.417	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,19 %	30.818.977.417
6.1	Intensifikasi Penerimaan	Provinsi NTB	Jumlah proyeksi	894,23	9.513.781.709	Intensifikasi Penerimaan	Provinsi NTB	Jumlah proyeksi	894,23	9.513.781.709

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
	Pajak Daerah		penerimaan PKB dan BBNKB	Milyar rupiah		Pajak Daerah		penerimaan PKB dan BBNKB	Milyar rupiah	
6.2	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Provinsi NTB	Jumlah Rekomendasi kesamsatan	4 Rekomendasi	3.368.174.745	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Provinsi NTB	Jumlah Rekomendasi kesamsatan	4 Rekomendasi	3.368.174.745
6.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	1 Samsat	1.134.800.180	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	1 Samsat	1.134.800.180
6.4	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	282,08 Milyar rupiah	566.850.830	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	282,08 Milyar rupiah	566.850.830
6.5	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan	1,38 Milyar rupiah	319.649.968	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan	1,38 Milyar rupiah	319.649.968
6.6	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok	354,22 Milyar rupiah	649.059.423	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok	354,22 Milyar rupiah	649.059.423
6.7	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan	3.608,05 Milyar rupiah	1.222.275.625	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan	3.608,05 Milyar rupiah	1.222.275.625
6.8	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	27,18 Milyar rupiah	251.388.815	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	27,18 Milyar rupiah	251.388.815
6.9	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)	4 Dokumen	790.653.746	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)	4 Dokumen	790.653.746
6.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya	388,07 Milyar rupiah	1.185.019.307	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya	388,07 Milyar rupiah	1.185.019.307
6.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	4 Dokumen	75.877.049	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	4 Dokumen	75.877.049



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
6.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Regulasi)	7 Regulasi	654.248.132	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yg difasilitasi penyusunannya (Regulasi)	7 Regulasi	654.248.132
6.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Kendaraan bermotor terjaring operasi penertiban kendaraan bermotor (Obyek)	24.451 Obyek	4.465.864.406	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Kendaraan bermotor terjaring operasi penertiban kendaraan bermotor (Obyek)	24.451 Obyek	4.465.864.406
6.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali)	11 Kali	2.053.245.226	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali)	11 Kali	2.053.245.226
6.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Singkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)	4 Dokumen	332.406.085	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Singkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)	4 Dokumen	332.406.085
6.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)	233.500 Obyek	1.717.820.184	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)	233.500 Obyek	1.717.820.184
6.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Dokumen)	10 Dokumen	199.391.916	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Dokumen)	10 Dokumen	199.391.916
6.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)	12 Dokumen	422.978.744	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)	12 Dokumen	422.978.744
6.19	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)	2 Dokumen	288.212.130	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)	2 Dokumen	288.212.130
6.20	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan	Provinsi NTB	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan	10 Dokumen	436.194.363	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan	Provinsi NTB	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	10 Dokumen	436.194.363

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)
	Daerah		sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun (Laporan)			Daerah		pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun (Laporan)		
6.21	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)	8 Paket	490.725.706	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)	8 Paket	490.725.706
6.22	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)	3 Paket	680.359.128	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)	3 Paket	680.359.128

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 diambil dari proses *bottom up planning* dan *top down planning* dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dan rancangan awal Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 – 2023. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh UPTB-UPPD/Samsat dan mitra kerjanya diseluruh Kab/Kota se-NTB yang berjumlah 10 (sepuluh) unit yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan beserta jajaran Bappenda Provinsi NTB.

Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan makin berbasis teknologi berkualifikasi layanan seperti perbankan, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan dalam menerima pelayanan. Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat adalah peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi. Disamping itu di Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berencana akan menyelesaikan tahapan akhir beberapa gedung pelayanan UPTB UPPD yang terdampak akibat bencana gempa bumi tektonik tahun 2018 lalu. Selain itu ada rencana relokasi UPTB Selong yang semula di jalan Dewi Sartika, Rakam – Selong akan dipindahkan ke Jl. Prof. Moh. Yamin, Selong. Demikian juga dengan pembangunan gedung Dirlantas, yang telah melakukan peletakan batu pertama dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2019.

Tabel 2.7

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Se Prov. NTB	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	
01.01	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bappenda Provinsi NTB	Provinsi NTB	Prosentase terfasilitasinya kebutuhan dasar operasional seperti listrik, air, telepon, internet, ATK, perangk, materai, pengan-daan, cetakan makan dan minum, serta perjalanan dinas	100	
01.02	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Mataram	Kota Mataram	Sda	100	
01.03	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Gerung	Kab. Lombok Barat	Sda	100	
01.04	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Praya	Kab. Lombok Tengah	Sda	100	
01.05	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Tanjung	Kab. Lombok Utara	Sda	100	
01.06	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Selong	Kab. Lombok Timur	Sda	100	
01.07	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Sda	100	
01.08	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa	Sda	100	
01.09	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Dompu	Kab. Dompu	Sda	100	
01.10	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB - UPPD Raba	Kota Bima	Sda	100	
01.11	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB-UPPD Panda	Kab. Bima	Sda	100	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Se Prov. NTB	Persentase Ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	
02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase terfasilitasinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	100	

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
02.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTB UPPD Kab/Kota se Provinsi NTB	se Provinsi NTB	Sda	100	
02.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Sda	100	
02.04	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor pada UPTB UPPD Kab/Kota se Provinsi NTB	Tanjung; Selong; Taliwang dan Sumbawa	Tingkat pemenuhan Pembangunan Gedung Kantor dan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana akibat bencana gempa bumi	100	
02.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan gedung kantor	100	
02.06	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan kendaraan operasional	100	
02.07	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100	
02.08	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	se Provinsi NTB	Terfasilitasinya pemeliharaan peralatan kantor	100	
02.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan untuk wajib pajak	100	
02.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTB - UPPD Kab/Kota se Provinsi NTB	se Provinsi NTB	Sda	100	
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Se Prov. NTB	Persentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	
05.01	Bimbingan Teknis Aplikasi Samsat se NTB (Aplikasi Samsat, Penetapan Pajak Daerah, Bendahara Penerima, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Barang Daerah)	Kota Mataram	1) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal 2) Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif 3) Proporsi aparatur yg memiliki sertifikat kompetensi profesi	100	
05.02	Pembinaan mental dan fisik Aparatur Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase terpenuhinya Narasumber/Instruktur Olah Raga, Penceramah Agama, Bahan Obat-Obatan, Sarana Olah Raga, Kursus singkat, pelatihan/seminar/Kursus, Rakor, Raker dan Pakaian Dinas	100	
05.03	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Mataram	Kota Mataram	Sda	100	
05.04	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Gerung	Kab. Lombok Barat	Sda	100	
05.05	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Praya	Kab. Lombok Tengah	Sda	100	
05.06	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Tanjung	Kab. Lombok Utara	Sda	100	
05.07	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Selong	Kab. Lombok Timur	Sda	100	
05.08	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Taliwang	Kab. Sumbawa Barat	Sda	100	
05.09	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Sumbawa Besar	Kab. Sumbawa	Sda	100	
05.10	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Dompu	Kab. Dompu	Sda	100	
05.11	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Raba	Kota Bima	Sda	100	
05.12	Pembinaan mental dan fisik Aparatur UPTB - UPPD Panda	Kab. Bima	Sda	100	
05.13	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Provinsi NTB	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	11	

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
05.14	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Provinsi NTB	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan	2	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	se Prov. NTB	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	93	
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mataram	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKJIP, LKPJ, LPPD, Lap.Tahunan, Laporan Evaluasi Kinerja)	44	
06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappenda Provinsi NTB	Kota Mataram	Prosentase Laporan keuangan Bappenda Provinsi NTB	1	
06.03	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Kota Mataram	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja OPD; RKA, DPA; DPPA; Ranhir Renstra OPD, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja dan Pakta Integritas Individu/IKI. yang disusun	47	
06.04	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD	Kota Mataram	Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Profil Kinerja dan Data Informasi OPD	1	
07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	se Prov. NTB	Persentase Peningkatan Kapasitas PAD	12,5	
07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Provinsi NTB	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	11 Dokumen	
07.18	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Provinsi NTB	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	1 Dokumen	
07.20	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Mataram	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	4 Dokumen	
28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	se Prov. NTB	Persentase Peningkatan Kapasitas PAD	12,5	
28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Provinsi NTB	Jumlah proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB	894,23 Milyar rupiah	
28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Provinsi NTB	Jumlah Rekomendasi kesamsatan	4 Rekomendasi	
28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Provinsi NTB	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	1 Samsat	
28.04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	282,08 Milyar rupiah	
28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan	1,38 Milyar rupiah	
28.06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok	354,22 Milyar rupiah	
28.07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan	3.608,05 Milyar rupiah	
28.08	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	27,18 Milyar rupiah	
28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)	4 Dokumen	
28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya	388,07 Milyar rupiah	
28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	4 Dokumen	



No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Regulasi)	7 Regulasi	
28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah kendaraan bermotor terjaring operasi penertiban kendaraan bermotor (Obyek)	24.451 Obyek	
28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Penutan Pajak (kali)	11 Kali	
28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)	4 Dokumen	
28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)	233.500 Obyek	
28.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Provinsi NTB, Prov.lainnya	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Dokumen)	10 Dokumen	
28.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)	12 Dokumen	
28.19	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)	2 Dokumen	
28.20	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun (Laporan)	10 Dokumen	
28.21	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)	8 Paket	
28.22	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)	3 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Bappenda Provinsi NTB yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di dalam membuat Rencana Kerjanya berpedoman pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, sehingga di dalam menentukan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan visi NTB Gemilang, dan mendukung kebijakan nasional.

Kebijakan nasional yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, penerapan standar pelayanan publik dan pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 telah mengacu kepada Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023, yang disesuaikan dengan perkiraan-perkiraan kondisi dan asumsi potensi pendapatan di Tahun 2019 serta arahan pembangunan daerah yang ada pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023.

Untuk itu, tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel (dalam RPJMD)
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang makin optimal
3. Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya
4. Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas
5. Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing

Dari tujuan-tujuan tersebut, sasaran yang diharapkan dapat tercapai adalah:

1. Penguatan Fiskal Daerah (Sasaran dalam RPJMD)
2. Tercapainya peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah
3. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan diluar Pajak daerah
4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah
5. Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi serta Inovasi layanan pendapatan daerah
6. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2020, akan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat. Adapun rumusan program dan kegiatan tersebut telah di sinkronkan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 6 (Sepuluh) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 63.882.646.240,- Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Bappenda Induk dan UPTB UPPD se-NT				63.882.646.240				68.548.512.275	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	se-NTB	100	%	16.712.422.493	PAD	100	17.760.688.125	
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah SURAT	Provinsi NTB	17.500	Surat	135.130.299	PAD	Lanjutan	17.500	143.606.177
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	JENIS Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	4	Jenis	3.143.022.759	PAD	Lanjutan	4	3.340.164.899
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Provinsi NTB	83	Orang	1.094.419.554	PAD	Lanjutan	83	1.163.065.641
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Provinsi NTB	115	Orang	2.626.852.799	PAD	Lanjutan	115	2.791.618.829
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	Provinsi NTB	620	Jenis	1.183.665.731	PAD	Lanjutan	716	1.257.909.671
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	145	Jenis/Pkt	1.943.129.028	PAD	Lanjutan	168	2.065.009.347
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	12	Jenis	148.895.829	PAD	Lanjutan	15	158.235.132
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	267	Unit/Pkt	2.702.427.723	PAD	Lanjutan	309	2.871.934.095

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	Provinsi NTB	147	Media/ Exp	107.589.675	PAD	Lanjutan	170	114.338.101
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Orang yang dijamu makanan dan minuman	Provinsi NTB	144	kali	554.640.748	PAD	Lanjutan	144	589.429.889
01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Orang penyelaras program pusat dan daerah	Provinsi NTB	63	kali	600.356.178	PAD	Lanjutan	83	638.012.762
01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	Provinsi NTB	17	Orang	870.010.605	PAD	Lanjutan	17	924.580.924
01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	Provinsi NTB	54	Orang	1.602.281.566	PAD	Lanjutan	54	1.702.782.657
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	Provinsi NTB	100	%	13.540.967.857			100	14.609.218.701
02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Provinsi NTB	23	Unit	3.825.281.007	PAD	Lanjutan	27	5.127.345.922
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	43	Unit	1.578.216.606	PAD	Lanjutan	50	1.680.261.210
02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebeleur	Provinsi NTB	53	Buah/Pkt	978.506.105	PAD	Lanjutan	61	1.041.774.523
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	Provinsi NTB	12	Paket	933.282.187	PAD	Lanjutan	12	993.626.509
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Provinsi NTB	170	Unit	2.140.246.900	PAD	Lanjutan	179	2.278.631.287
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Provinsi NTB	12	Unit	330.499.060	PAD	Lanjutan	12	351.868.525
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Provinsi NTB	12	Unit	358.600.080	PAD	Lanjutan	12	381.786.525
02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Provinsi NTB	12	Paket	3.396.335.912	PAD	Lanjutan	12	2.753.924.200
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur	Provinsi NTB	100	%	944.462.372			100	1.005.529.585
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis	Provinsi NTB	45	Orang	284.938.143	PAD	Lanjutan	45	303.361.724

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		substantif, diklat teknis struktural dan fungsional								
05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Provinsi NTB	48	Kali	237.169.871	PAD	Lanjutan	48	252.504.842
05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	Provinsi NTB	11	Unit	243.469.283	PAD	Lanjutan	11	259.211.562
05.24	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan	Provinsi NTB	2	Paket	178.885.075	PAD	Lanjutan	2	190.451.457
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja OPD	Provinsi NTB	93	Dokumen	1.093.303.036			93	1.163.994.014
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKJIP, LKPJ, LPPD, Lap.Tahunan, Laporan Evaluasi Kinerja) yang disusun	Provinsi NTB	44	Dokumen	255.405.359	PAD	Lanjutan	44	271.919.403
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun	Mataram	1	Dokumen	238.013.209	PAD	Lanjutan	1	253.402.708
06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renstra 18-23 draft awal; Renja OPD; RKA, DPA; DPPA; Ranhir Renstra OPD, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi Kinerja dan Pakta Integritas Individu/IKI. yang disusun	Mataram	47	Dokumen	431.459.399	PAD	Lanjutan	47	459.356.776
06.17	Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kerjanya	Mataram	1	Dokumen	168.425.069	PAD	Lanjutan	1	179.315.127
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	Provinsi NTB	85	%	772.513.065			85	826.720.980
07.01	Peningkatan Management	Jumlah laporan pengelolaan	Provinsi NTB	11	Dokumen	503.582.838	PAD	Lanjutan	11	536.143.585

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Asset/Barang Milik Daerah	asset/barang milik daerah								
07.18	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	Provinsi NTB	1	Dokumen	174.509.166	PAD	Lanjutan	1	185.792.609
07.20	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	Mataram	4	Dokumen	94.421.061	PAD	Lanjutan	4	104.784.786
28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	Provinsi NTB	47,19	%	30.818.977.417		Baru	49,33	33.182.360.870
28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB	Provinsi NTB	894,23	Milyar rupiah	9.513.781.709	PAD	Lanjutan	1.086,99	10.243.355.373
28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah Rekomendasi kesamsatan	Provinsi NTB	4	Rekomendasi	3.368.174.745	PAD	Lanjutan	4	3.626.466.523
28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	Provinsi NTB	1	Samsat	1.134.800.180	PAD	Lanjutan	2	1.221.823.442
28.04	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Provinsi NTB	282,08	Milyar rupiah	566.850.830	PAD	Lanjutan	342,89	610.320.341
28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan	Provinsi NTB	1	Milyar rupiah	319.649.968	PAD	Lanjutan	2	344.162.639
28.06	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok	Provinsi NTB	354	Milyar rupiah	649.059.423	PAD	Lanjutan	430,57	698.833.180
28.07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan	Provinsi NTB	3.608,05	Milyar rupiah	1.222.275.625	PAD	Lanjutan	3.736,72	1.316.007.028
28.08	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	Provinsi NTB	27,19	Milyar rupiah	251.388.815	PAD	Lanjutan	47,22	270.666.812
28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)	Provinsi NTB, Prov.lainnya	4	Dokumen	790.653.746	PAD	Lanjutan	4	851.285.802
28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	388,07	Milyar rupiah	1.185.019.307	PAD	Lanjutan	418,96	1.275.893.672
28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya	Provinsi NTB, Prov.lainnya	4	Dokumen	75.877.049	PAD	Lanjutan	4	81.695.754
28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang	Provinsi NTB,	7	Regulasi	654.248.132	PAD	Lanjutan	7	704.419.790



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Regulasi)	Prov.lainnya							
28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Jumlah frekuensi pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor (Kali)	Provinsi NTB, Prov.lainnya	24.451	Kali	4.465.864.406	PAD	Lanjutan	23.951	4.808.333.590
28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali)	Provinsi NTB	11	Kali	2.053.245.226	PAD	Lanjutan	11	2.210.700.346
28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)	Provinsi NTB, Prov.lainnya	4	Dokumen	332.406.085	PAD	Lanjutan	4	357.896.971
28.16	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)	Provinsi NTB, Prov.lainnya	233.500	Obyek	1.717.820.184	PAD	Lanjutan	233.500	1.849.552.906
28.17	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan	Provinsi NTB, Prov.lainnya	10	Dokumen	199.391.916	PAD	Lanjutan	10	214.682.480
28.18	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)	Provinsi NTB	12	Dokumen	422.978.744	PAD	Lanjutan	12	455.415.283
28.19	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)	Provinsi NTB	2	Dokumen	288.212.130	PAD	Lanjutan	2	310.313.959
28.20	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun	Provinsi NTB	10	Dokumen	436.194.363	PAD	Lanjutan	12	469.644.355
28.21	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)	Provinsi NTB	8	Paket	490.725.706	PAD	Lanjutan	10	528.357.488
28.22	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	Provinsi NTB	3	Paket	680.359.128	PAD	Lanjutan	4	732.533.134

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Gubernur NTB. Rencana Kerja (Renja) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja ini juga merupakan Rencana pencapaian Kinerja Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu; anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen beserta para pihak yang melaksanakan Program dan Kegiatan, serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Bappenda Provinsi NTB tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS; penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.